

## Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah

Aji Fatwa Kusuma\*, Aminuddin Anwar

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author: 19313142@students.uui.ac.id

---

### JEL Classification Code:

O4, E62, H3

### Kata kunci:

Desentralisasi fiskal, transfer daerah, pertumbuhan ekonomi

### Email penulis:

aminuddin.anwar@uui.ac.id

### DOI:

10.20885/JKEK.vol2.iss2.art14

### Abstract

**Purpose** – This research aims to analyze regional fiscal dependence with regional transfers on regional economic growth in districts/cities in Central Java.

**Methods** – This research uses a panel data method shown from 35 districts/cities in Central Java from 2017 - 2022. The variables used in this research are economic growth, degree of fiscal decentralization, regional dependency ratio, human development index, unemployment, and poverty.

**Findings** – The results of this study conclude that the degree of fiscal decentralization and regional financial dependency ratios positively affect economic growth. Meanwhile, the human development index has no effect on economic growth, open unemployment has a negative effect on economic growth, and poverty has no effect on economic growth.

**Implication** – The implication of this research is that an increase in regional fiscal independence or the degree of fiscal decentralization is needed to increase regional economic growth. The allocation of funds distributed by the central government to the regions can contribute to increasing regional government expenditure.

**Originality** – This research contributes to the economic analysis of public policy using empirical data and quantitative methods.

---

### Abstrak

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketergantungan fiskal daerah dengan adanya transfer daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

**Metode** – Penelitian ini menggunakan metode data panel yang ditunjukkan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode 2017 – 2022. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan daerah, indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan kemiskinan.

**Temuan** – Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Implikasi** – Implikasi dari penelitian ini adalah diperlukan peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah atau derajat desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan alokasi dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah ternyata mampu berkontribusi pada peningkatan pengeluaran pemerintah daerah.

**Orisinalitas** – Penelitian ini berkontribusi terhadap analisis ekonomi kebijakan publik menggunakan data empiris dan metode kuantitatif.

---

## Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan keadaan perekonomian yang terjadi pada suatu negara dari adanya sebuah proses secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan produksi barang dan jasa pada suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menilai secara makro mengenai kinerja pembangunan pada suatu negara. Menurut Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja dan perkembangan teknologi (Sukirno, 1994). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum sehingga belum bisa menggambarkan kemampuan masyarakat secara individual.

Salah satu cara bagi pemerintah pusat untuk mengelola kepemilikan sumber daya alamnya secara memadai adalah melalui otonomi daerah. Dengan melalui otonomi daerah maka pemerintah pusat akan memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan secara lebih leluasa untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Awal mula sistem penyelenggaraan otonomi daerah sendiri mulai ditetapkan di Indonesia ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang berisi mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 33 yang berisi mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut telah dijadikan sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia, terkecuali di daerah Ibu Kota DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mendapatkan otonomi khusus.

Implikasi diterapkannya sistem otonomi daerah pasca reformasi adalah daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola pembangunan daerahnya sendiri. Adanya sistem otonomi membuat daerah lebih leluasa dalam mengembangkan potensi sesuai dengan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga dapat meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia. Bentuk tanggung jawab pemerintah pusat atas berlangsungnya proses otonomi daerah dapat dilihat dari adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah. Di sisi lain, dengan adanya dana perimbangan yang terlalu besar menimbulkan kesan bahwa daerah belum mandiri secara finansial, sehingga bisa dikatakan bahwa otonomi daerah belum berhasil dilaksanakan. Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber PAD seperti pajak dan retribusi daerah disebut sebagai kemandirian daerah. Menurut Halim (2004), salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah yaitu menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal. Rasio derajat desentralisasi fiskal itu sendiri merupakan hasil perhitungan dari tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan penerimaan daerah. Semakin tinggi tingkat derajat desentralisasi fiskal, maka menunjukkan semakin besar pula porsi belanja daerah yang didanai dari sumber penerimaan yang dihasilkan sendiri oleh daerah (Halim, 2004). Dengan demikian, ketika PAD suatu daerah memiliki kontribusi yang semakin tinggi terhadap total pendapatan daerah tersebut, maka akan menggambarkan semakin baik pula kemandirian serta pengelolaan keuangan daerahnya. Oleh sebab itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik (Berliani, 2016).

Banyak dampak yang bisa ditimbulkan dengan adanya penerapan otonomi daerah terhadap daerah yaitu salah satunya membuat daerah menjadi lebih mandiri secara fiskal. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Sularso, dkk (2012) menyimpulkan bahwa secara tidak langsung faktor pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa dalam otonomi daerah terdapat indikator lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu kinerja keuangan daerah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso dkk., 2019), dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka berdampak pada

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah yang masih belum bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Halim, 2009).

Trend positif tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan di Jawa Tengah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak. Selain itu program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur, akan tetapi juga berfokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi.

**Tabel 1.** Proporsi PAD dalam total APBD setiap provinsi di pulau jawa

Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	67,50 %	67,70 %	70,02 %	71,88 %	71,86 %
Yogyakarta	33,45 %	33,29 %	35,29 %	32,29 %	38,13 %
Banten	59,65 %	33,92 %	64,67 %	62,29 %	73,20 %
Jawa Barat	55,01 %	56,66 %	60,65 %	60,44 %	67,72 %
Jawa Timur	54,01 %	52,69 %	55,79 %	52,15 %	62,36 %
Jawa Tengah	53,22 %	54,34 %	55,52 %	55,79 %	67,34 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pada saat ini pulau jawa merupakan pulau yang menjadi pusat pembangunan ekonomi di Indonesia. Tabel 1 menunjukkan data persentase proporsi pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD di setiap provinsi di pulau jawa dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dari keenam provinsi yang ada, hanya provinsi Jawa Tengah yang terus mengalami trend kenaikan positif setiap tahunnya dalam memberikan kontribusi PAD terhadap total APBD tanpa adanya fluktuasi dibandingkan dengan provinsi lain di pulau jawa. Meskipun pada tahun 2018 provinsi Jawa Tengah menduduki posisi ke 5 terendah di bawah Yogyakarta dari keenam provinsi yang ada, akan tetapi setiap tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 sendiri Jawa tengah mampu menduduki posisi ke 4, naik satu peringkat dari tahun 2018 lalu di bawah Yogyakarta dan Banten sebagai provinsi dengan persentase kontribusi PAD tertinggi di pulau jawa.

**Tabel 2.** Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 setiap provinsi di pulau jawa

Provinsi	Tahun					Rata-Rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
DKI Jakarta	6,11 %	5,82 %	-2,39 %	3,56 %	5,25 %	3,67 %
Yogyakarta	6,20 %	6,59 %	-2,67 %	5,58 %	5,15 %	4,17 %
Banten	5,77 %	5,26 %	-3,39 %	4,49 %	5,03 %	3,43 %
Jawa Barat	5,65 %	5,02 %	-2,52 %	3,74 %	5,45 %	3,46 %
Jawa Timur	5,47 %	5,53 %	-2,33 %	3,56 %	5,34 %	3,51 %
Jawa Tengah	5,30 %	5,36 %	-2,65 %	3,33 %	5,31 %	3,33 %

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2 menunjukkan data mengenai laju pertumbuhan PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto) (Atas Dasar Harga Konstan) tahun 2010 di setiap provinsi yang ada di pulau jawa dalam lima tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi terbawah dari ke-6 provinsi yang ada dengan rata-rata laju PDRB sebesar 3,33%. Sedangkan di posisi pertama ditempati oleh Provinsi Yogyakarta dengan rata-rata laju PDRB sebesar 4,17% dan kemudian disusul oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata laju PDRB sebesar 3,67%. Posisi ke-3 sendiri ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata laju PDRB sebesar 3,46%, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata laju PDRB sebesar 3,51%, dan di posisi ke-5 ditempati oleh Provinsi Banten dengan rata-rata laju PDRB sebesar 3,43%.

Penelitian awal mengenai kemandirian daerah yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh (Prakoso dkk., 2019) dan (Suci & Asmara, 2018). Kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode analisis berupa analisis regresi dengan metode data panel serta sama-sama membahas bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang membahas mengenai kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Alisman & Sufriadi, 2020) dan (Sutriani, 2015). Kedua penelitian ini sama-sama membahas bagaimana pengaruh kemandirian dan ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam penelitian (Sutriani, 2015) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan dan rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurulita et al., 2018), (Rinova & Dewi, 2021) dan (Sari dkk., 2019). Ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian (Nurulita et al., 2018) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Rinova & Dewi, 2021) menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio ketergantungan regional tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan rasio efektivitas LGR (*Locally-Generated Revenue*) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Sari et al., 2019) menunjukkan bahwa bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan rasio efektivitas juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, rasio ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan kedua tabel diatas menunjukkan jika dilihat dari kenaikan persentase sumbangan PAD terhadap total APBD tiap tahunnya maka bisa dikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah mulai dapat mengelola potensi daerah yang ada dengan baik sebagai sumber pendapatan daerah. Namun, ketika dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung masih rendah dibandingkan provinsi lain maka bisa dikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Maka dari itu, menjadikan hal ini menarik untuk dikaji.

## Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk variabel independen terhadap 5 variabel yang digunakan yaitu derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan di 35 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017–2022.

Persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Growth_{it} = \beta_0 + \beta_1 DDF_{it} + \beta_2 RKKD_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 Pov_{it} + e_{it}$$

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu regresi data panel yang terdiri dari dua data gabungan yaitu data *Cross section* (data silang) dan *Time Series* (runtun waktu). *Data Cross section* (data silang) dalam penelitian ini terdiri dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan data *Time Series* (runtun waktu) yang digunakan yaitu menggunakan periode waktu tahun 2017 – 2022. Terdapat 3 jenis metode pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

*Common Effect Model* merupakan salah satu metode pendekatan regresi data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan antara data *time series* dan *cross section*. Dalam pendekatan *Common Effect Model* tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data antara kabupaten sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2018).

Dikarenakan dalam *Common Effect Model* tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu atau menganggap bahwa setiap observasi dalam cross section memiliki intersep yang sama, maka dalam estimasi model data panel dapat memakai metode yang biasa disebut dengan metode OLS (*Ordinary Least Squares*).

**Tabel 3.** Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Satuan	Definisi	Sumber
<b>Variabel Dependen</b>				
Pertumbuhan Ekonomi	Growth	Persen	Persentase perubahan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga tetap yang ditentukan menggunakan suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar	BPS
<b>Variabel Independen</b>				
Derajat Desentralisasi Fiskal	DDF	Persen	Alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal. $DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100\%$	DJPK Kemenkeu
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	RKKD	Persen	Alat ukur yang digunakan untuk melihat seberapa besar daerah bergantung terhadap salah satu sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan transfer. $RKDD = \frac{\text{Total Pendapatan Transfer daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100\%$	DJPK Kemenkeu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM	Persen	Indeks komposit yang menggambarkan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.	BPS
Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persen	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	BPS
Kemiskinan	POV	Persen	Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan.	BPS

Menurut Sriyana (2014), *Fixed Effect Model* merupakan suatu regresi yang menunjukkan perbedaan intersep antar objek. Model ini mengasumsikan setiap observasi dalam cross section memiliki intersep yang berbeda-beda. Dikarenakan dalam *Fixed Effect Model* berasumsi bahwa terdapat adanya perbedaan intersep antar objek, maka untuk menjelaskan adanya perbedaan tersebut dapat digunakan metode yang disebut dengan *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*. Menurut Sriyana (2014), *Random Effect Model* merupakan suatu regresi yang memiliki asumsi bahwa terdapat perbedaan intersep dan konstanta yang disebabkan oleh residual/error sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara random. Keuntungan yang bisa diperoleh ketika menggunakan *Random Effect Model* yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

Uji pemilihan model yang terbaik dilakukan dengan 3 jenis uji pemilihan model. Pertama yaitu ada Uji Chow yang akan membandingkan dua jenis model yaitu *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Kedua yaitu ada Uji Hausman yang akan membandingkan dua jenis model yaitu *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Uji ketiga atau terakhir yaitu adalah Uji Lagrange Multiplier yang akan membandingkan dua jenis model yaitu *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Uji Chow dilakukan untuk membandingkan dua jenis model yaitu *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Kedua jenis model tersebut dibandingkan untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan dalam estimasi. Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan dua jenis model yaitu *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Kedua jenis model tersebut dibandingkan untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan dalam estimasi. Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk membandingkan dua jenis model yaitu *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Kedua jenis model tersebut dibandingkan untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan dalam estimasi.

## Hasil dan Pembahasan

Analisis awal yang dilakukan adalah analisis deskriptif variabel yang akan menjelaskan mengenai nilai *mean* (rata-rata), *median* (nilai tengah), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum dari setiap variabel penelitian yang digunakan untuk Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 4.** Hasil Statistik Deskriptif Variabel

Statistik Deskriptif	Growth	DDF	RKKD	IPM	TPT	Pov
Mean	3.888762	18.93382	61.52610	72.37229	5.166048	11.14862
Median	5.335000	17.04500	61.89000	71.30500	4.795000	10.77500
Maximum	6.980000	57.29000	88.60000	84.35000	9.970000	20.32000
Minimum	-10.28000	9.580000	36.95000	64.86000	1.760000	3.980000
Std. Dev.	2.890511	7.064363	5.340337	4.451196	1.926415	3.600586

Pada tabel 4 menunjukkan hasil dari perhitungan statistik deskriptif berdasarkan setiap variabel. Pertama yaitu hasil perhitungan statistik deskriptif pada variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,88% dengan standar deviasi sebesar 2,89%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,98%, sedangkan untuk tingkat pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -10,28%. Pada variabel derajat desentralisasi fiskal sebagai variabel independen menunjukkan bahwa rata-rata tingkat derajat desentralisasi fiskal berada di angka 18,93% dengan standar deviasi sebesar 7,06%. Tingkat derajat desentralisasi fiskal tertinggi terjadi di Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 57,29%, %, sedangkan untuk tingkat derajat desentralisasi fiskal terendah terjadi di Kabupaten Blora pada tahun 2018 sebesar 9,58%. Variabel rasio ketergantungan keuangan daerah sebagai variabel independen menunjukkan bahwa rata-rata tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah berada di angka 61,52% dengan standar deviasi sebesar 5,34%. Tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebesar 88,60%, sedangkan untuk tingkat derajat desentralisasi fiskal terendah terjadi di Kota Semarang pada tahun 2021 sebesar 36,95%.

Hasil perhitungan statistik deskriptif dari variabel indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen menunjukkan bahwa rata-rata tingkat indeks pembangunan manusia berada di angka 72,37 dengan standar deviasi sebesar 4,45. Tingkat indeks pembangunan manusia tertinggi terjadi di Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar 84,35, sedangkan untuk tingkat indeks pembangunan manusia terendah terjadi di Kabupaten Brebes pada tahun 2017 sebesar 64,86. Pada variabel tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel independen menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,16% dengan standar deviasi sebesar 1,92%. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Kabupaten Tegal dan Cilacap di tahun yang sama yaitu pada tahun 2021 sebesar 9,97%, sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka terendah terjadi di Kabupaten Rembang pada tahun 2022 sebesar 1,76%. Variabel kemiskinan sebagai variabel independen menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan berada di angka 11,14% dengan standar deviasi sebesar 3,60%. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 sebesar 20,32%, sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka terendah terjadi di Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar 3,98%.

Estimasi model regresi data panel maka terdapat 3 jenis metode pendekatan yang digunakan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Hasil dari regresi pengujian data panel dengan model pendekatan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* akan ditampilkan dalam tabel 5.

Setelah dilakukannya regresi dari ketiga model tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menentukan model mana yang terbaik diantara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Dalam pemilihan model akan dilakukan 3 jenis uji pemilihan model yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier.

**Tabel 5.** Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel

Variabel	Common Effect Model		Fixed Effect Model		Random Effect Model	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	8.249852	0.1679	-0.550666	0.9837	8.249852	0.1218
DDF	0.223649	0.0000	0.298919	0.0053	0.223649	0.0000
RKKD	0.111774	0.0099	0.211627	0.0005	0.111774	0.0038
IPM	-0.178414	0.0243	-0.062253	0.8625	-0.178414	0.0116
TPT	-0.641830	0.0000	-1.529964	0.0000	-0.641830	0.0000
KMSKN	0.067752	0.3378	-0.164288	0.5952	0.067752	0.2820
F-statistic	9.050297		3.697129		9.050297	
Prob (F-statistic)	0.000000		0.000000		0.000000	
R-squared	0.181550		0.458923		0.181550	
Observations	210		210		210	

**Tabel 6.** Hasil Uji Pemilihan Model Regresi

Uji Chow			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.563157	(34,170)	0.0000
Cross-section Chi-square	86.908660	34	0.0000
Uji Lagrange Multiplier			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.420825 (0.5165)	1705.420 (0.0000)	1705.841 (0.0000)
Uji Hausman			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	66.086267	5	0.0000

Hasil dari Uji Chou menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada Cross-section F memiliki nilai sebesar 0.0000. Dengan menggunakan alpha ( $\alpha$ )=5% atau 0,05, maka berdasarkan pada tabel 4.3 menunjukkan nilai probabilitas statistik lebih kecil dari alpha ( $0.0000 < 0,05$ ), sehingga menolak  $H_0$ , Maka dari itu. dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam estimasi adalah *Fixed Effect Model*. Hasil dari Uji Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada Breusch-Pagan memiliki nilai sebesar 0.5165. Dengan menggunakan alpha ( $\alpha$ )=5% atau 0,05, maka berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari alpha ( $0.5165 > 0,05$ ), sehingga gagal menolak  $H_0$ . Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam estimasi adalah *Common Effect Model*. Hasil dari Uji Hausman pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada Cross-section random memiliki nilai sebesar 0.0000. Dengan menggunakan alpha ( $\alpha$ )=5% atau 0,05, maka menunjukkan bahwa nilai probabilitas statistik lebih kecil dari alpha ( $0.0000 < 0,05$ ), sehingga menolak  $H_0$ . Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam estimasi adalah *Fixed Effect Model*.

Berdasarkan hasil uji pemilihan model diatas maka dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik serta paling tepat digunakan dalam estimasi untuk penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

**Tabel 7.** Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.550666	26.93288	-0.020446	0.9837
DDF	0.298919	0.105735	2.827070	0.0053
RKKD	0.211627	0.059896	3.533273	0.0005
IPM	-0.062253	0.358941	-0.173436	0.8625
TPT	-1.529964	0.176996	-8.644060	0.0000
KMSKN	-0.164288	0.308612	-0.532346	0.5952
R-squared	0.458923	F-statistic		3.697129
Adjusted R-squared	0.334793	Prob(F-statistic)		0.000000

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa untuk variabel derajat desentralisasi fiskal memperoleh nilai koefisien sebesar 0.298919 serta probabilitas sebesar 0.0053. Dengan

menggunakan alpha ( $\alpha$ )=5% atau 0,05, maka berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari alpha ( $\alpha$ ) ( $0.0053 < 0,05$ ), sehingga menolak  $H_0$ . Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika derajat desentralisasi fiskal naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,298919%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah maka dapat membuat pemerintah daerah menjadi lebih efisien dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi akan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan fiskal yang lebih efisien dan relevan sesuai dengan kebutuhan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih cepat dan tepat serta mampu merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di daerahnya sendiri, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta dapat lebih mendukung proyek-proyek pembangunan daerah yang bisa berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Berdasarkan hasil pengujian serta penjelasan tersebut, maka hal ini telah selaras dengan hasil penelitian (Alisman & Sufriadi, 2020) yang menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Barat Selatan Aceh pada tahun 2011-2019 dan diperkuat oleh penelitian (Suci & Asmara, 2018) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah atau derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di di Provinsi Banten pada tahun 2001-2011.

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa untuk variabel rasio ketergantungan keuangan daerah memperoleh nilai koefisien sebesar 0.211627 serta probabilitas sebesar 0.0005. Dengan menggunakan alpha ( $\alpha$ )=5% atau 0,05, maka berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari alpha ( $\alpha$ ) ( $0.0005 < 0,05$ ), sehingga menolak  $H_0$ . Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika rasio ketergantungan keuangan daerah naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,211627%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah tidak selalu secara negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dalam alokasi transfer ke daerah ternyata dapat berkontribusi pada peningkatan pengeluaran pemerintah daerah. Adanya transfer pusat mampu membuat pemerintah daerah menjadi lebih terbantu dalam pembiayaan proyek-proyek penting seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia melalui sektor pendidikan serta layanan dasar lainnya yang bisa mendorong pertumbuhan daerah. Selain itu, adanya transfer pusat juga dapat membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Adanya transfer pusat bisa dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang stabil, sehingga mampu mengurangi ketidakstabilan atau fluktuasi dalam anggaran pemerintah daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi seperti perubahan dalam tingkat inflasi hingga naik turunnya siklus dalam perekonomian. Ketika stabilitas keuangan daerah dapat terjaga maka diharapkan dapat mendukung terjadinya pertumbuhan dalam jangka panjang. Hasil dari pengujian serta penjelasan tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian (Sutriani, 2015) yang menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2011-2015. Dalam konsep desentralisasi juga menjelaskan bahwa transfer pusat ke daerah merupakan salah satu aspek yang penting dari konsep desentralisasi fiskal itu sendiri. Salah satu faktor bisa membuat desentralisasi fiskal dapat dianggap efektif adalah ketika alokasi dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah mampu disalurkan secara adil berdasarkan kriteria yang transparan. Hal ini memastikan bahwa dana yang dialokasikan telah sesuai dengan kebutuhan serta potensi ekonomi yang ada di masing-masing daerah.

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa untuk variabel indeks pembangunan manusia memperoleh nilai koefisien sebesar -0.062253 serta probabilitas sebesar 0.8625. Dengan menggunakan alpha ( $\alpha$ )=5% atau 0,05, maka berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari alpha ( $\alpha$ ) ( $0.8625 > 0,05$ ), sehingga gagal menolak  $H_0$ . Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil dari pengujian regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap



pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian serta teori yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian (Yusuf et al., 2022) yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015-2020. Menurut penelitian (Yusuf et al., 2022) menyebutkan terdapat beberapa alasan yang menyebabkan IPM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti masih tingginya tingkat ketimpangan ekonomi dan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk jika diukur dari tingkat upah minimum provinsi maupun tingkat upah minimum regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa untuk variabel tingkat pengangguran terbuka memperoleh nilai koefisien sebesar  $-1.529964$  serta probabilitas sebesar  $0.0000$ . Dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  atau  $0,05$ , maka berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0.0000 < 0,05$ ), sehingga menolak  $H_0$ . Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika tingkat pengangguran terbuka naik  $1\%$  maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar  $-1,529964\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa ketika pengangguran mengalami penurunan maka tingkat output barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh suatu wilayah akan semakin besar, sehingga mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Berbeda halnya ketika pengangguran mengalami kenaikan. Peningkatan pengangguran akan menyebabkan jumlah output barang dan jasa yang mampu dihasilkan akan menurun, sehingga menyebabkan harga menjadi naik karena langkanya ketersediaan barang dan jasa di pasar karena menurunnya penawaran barang dan jasa. Dengan asumsi ceteris paribus ketika harga mengalami kenaikan maka akan terjadi penurunan daya beli masyarakat, sehingga hal tersebut akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti dapat memperlambat terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hasil dari pengujian serta penjelasan tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian (Yuanda & Haryatiningsih, 2022) yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung pada tahun 2005-2020.

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa untuk variabel kemiskinan memperoleh nilai koefisien sebesar  $-0.164288$  serta probabilitas sebesar  $0.5952$ . Dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  atau  $0,05$ , maka berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha$  ( $0.5952 > 0,05$ ), sehingga gagal menolak  $H_0$ . Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil dari pengujian regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu hal yang bisa membuat hal tersebut bisa terjadi yaitu karena tidak meratanya distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi hanya menghitung seberapa besar peningkatan output yang dihasilkan tanpa memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tidak meratanya pendapatan memungkinkan sebagian besar pendapatan hanya berpusat dalam kalangan masyarakat tertentu, sehingga ketika masih ada kalangan masyarakat yang memiliki pendapatan yang tergolong masih rendah maka akan sulit untuk keluar dari lingkup kemiskinan. Berdasarkan data BPS pada maret 2017 tingkat gini ratio di Provinsi Jawa Tengah tercatat berada di angka  $0,365$  dan pada maret 2022 tercatat berada di angka  $0,374$  sehingga terjadi kenaikan sebesar  $0,009$ . Selain itu, tingkat gini ratio di Provinsi Jawa Tengah pada maret 2022 juga masih berada dibawah angka nasional yang tercatat sebesar  $0,384$ . Berdasarkan penjelasan dan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan tidak selalu bisa mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Hasil dalam penelitian ini juga serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ummah et al., 2023) yang menunjukkan bahwa bahwa kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya pada tahun 2015-2019. Berdasarkan penelitian (Ummah et al., 2023) menyebutkan terdapat beberapa alasan yang menyebabkan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya seperti masih adanya disparitas pembangunan yang terjadi pada lapisan masyarakat paling bawah. Menurut (Ummah et al., 2023), perekonomian yang tinggi tidak dapat menjamin akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin jika masih terdapat disparitas pembangunan yang terjadi pada lapisan masyarakat paling bawah.

## Kesimpulan dan Implikasi

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka diperlukan peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah atau derajat desentralisasi fiskal. Dengan kata lain sumber pendapatan asli daerah harus ditingkatkan agar dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pendapatan asli daerah. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melaksanakan kebijakan yang mampu mengembangkan sumber daya daerah yang berpotensi meningkatkan PAD. Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022. Adanya alokasi dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah ternyata mampu berkontribusi pada peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang dapat digunakan oleh daerah untuk meningkatkan pengeluaran dalam berbagai sektor termasuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, keberhasilan peningkatan alokasi transfer dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah tergantung pada sejumlah faktor, termasuk efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas penggunaan dana tersebut.

Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022. Penelitian ini menyatakan bahwa dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa faktor penting yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran khususnya pengangguran terbuka. Salah satunya yaitu dengan memberikan dukungan terhadap para wirausahawan khususnya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) seperti dengan mempermudah dalam pengajuan pinjaman kredit usaha kecil, sehingga diharapkan UMKM bisa lebih berkembang dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

## Daftar Pustaka

- Alisman, A., & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal EMT KITA*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.35870/emt.v4i2.133>
- Berliani, K. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. *Jurnal-Inaba.Hol.Es*, 15(2). <http://>
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Pertama)*. Salemba Empat.
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni, Y. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau. *Jurnal Benefita*, 3(3), 336. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.3350>
- Prakoso, J. A., Islami, F. S., & Sugiharti, Rr. R. (2019). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 87-100. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1344>
- Rinova, R., & Dewi, F. G. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 1-17. <https://doi.org/10.23960/jak.v24i2.192>
- Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *JURNAL*

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 18(2).  
<https://doi.org/10.35794/jpekd.12789.18.2.2016>

- Sriyana, J. (2014). Metode Regresi Data Panel. Ekonisia.
- Suci, S. C., & Asmara, A. (2018). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 8–22. <https://doi.org/10.29244/jekp.3.1.2014.8-22>
- Sukirno, S. (1994). Pengantar Teori Ekonomi Makro (Edisi Kedua). PT. Raja Grasindo Perseda.
- Sukirno, S. (2004). Makro Ekonomi Teori Pengantar (Edisi Ketiga). PT Raja Grasindo Perseda.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2012). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2).
- Suprijati, J., & Yakin, A. (2017). Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bangkalan Setelah Adanya Pembangunan Jembatan Suramadu (Analisis Teori Harrod-Domar). *Develop*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/dev.v1i1.294>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- Sutriani, A. (2015). Analisis Kemandirian Dan Ketergantungan Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun. Sarolangun.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Ummah, I. R., Azizi, A. A., & Yasin, M. (2023). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Khususnya Inflasi dan Pengangguran di Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen Kreatif Dan Inovasi*, 1(3), 21–34.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (Edisi Kelima)*. UPP STIM YKPN.
- Yuanda, D. A., & Haryatiningsih, R. (2022). Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandung 2005-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 115–124. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1237>
- Yusuf, M. Z., Hidayati, N., Wibowo, M. G., & Khusniati, N. (2022). Pengaruh Pendidikan Dan Ipm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 19(1).